



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kinerja Rumah Sakit Pada RSUD Larantuka

Kupang, Selasa (29 Januari 2013) – Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, **B. Dwita Pradana** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Pada RSUD Larantuka kepada Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, **Marius Payong Pati** dan Bupati Flores Timur yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Flotim, **Petrus Pemangliku**. Penyerahan LHP tersebut dilaksanakan di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai efektifitas pengelolaan pelayanan rawat inap pada RSUD Larantuka yang mencakup 3 aspek, yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, dan 3) monitoring dan evaluasi. BPK RI dan RSUD Larantuka telah mengembangkan suatu kerangka model praktik pengelolaan yang baik (*better management practice model*) sebagai dasar untuk menilai efektifitas pengelolaan pelayanan rawat inap.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan RSUD Larantuka telah dan terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan pelayanan rawat inap sesuai dengan kerangka model praktik pengelolaan yang baik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit yang berlaku di seluruh Indonesia.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh RSUD Larantuka dalam meningkatkan pengelolaan pelayanan rawat inap, BPK RI masih menemukan permasalahan pokok dalam ketiga aspek sasaran pemeriksaan yang menghambat efektifitas kegiatan pengelolaan pelayanan rawat inap, antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan: BPK RI menemukan bahwa pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) belum sepenuhnya optimal;
2. Pelaksanaan: BPK RI menemukan bahwa pelaksanaan pengisian berkas rekam medik pada instalasi rawat inap belum sepenuhnya sesuai ketentuan, pelaksanaan *standar operating procedures* (SOP) pada instalasi rawat inap belum sepenuhnya dilakukan oleh personil sesuai dengan kompetensinya, pengelolaan perencanaan pembekalan farmasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai, dan pembenahan saran dan prasarana rumah sakit pada instalasi rawat inap dan instalasi penunjang Rawat Inap belum sepenuhnya sesuai kondisi yang memadai untuk menjadi rumah sakit tipe C;
3. Monitoring dan evaluasi: BPK RI menemukan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan pelayanan rawat inap serta pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Flores Timur TA 2011 Nomor 10.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 29 Juni 2012 pada temuan pelaksanaan pengadaan belanja makanan dan minuman pasien pada RSUD Larantuka Kabupaten Flores Timur belum sepenuhnya memadai.

Hasil pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit pada RSUD Larantuka ditindaklanjuti oleh DPRD dan Bupati/RSUD Larantuka dalam upaya perbaikan pelayanan RSUD kepada masyarakat Flores Timur dan sekitarnya. Selanjutnya, BPK akan memantau tindak lanjut tersebut melalui mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

HUMAS BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NTT

Informasi lebih lanjut:

Humas Perwakilan BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : hukmas.ntt@gmail.com